

**BUDAYA POLITIK ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT
DUABELAS JAMBI**

(Skripsi)

Oleh

KURNIA IMAM MUTTAQIN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

POLITICAL CULTURE ORANG RIMBA IN NATIONAL PARK BUKIT DUABELAS JAMBI

BY

KURNIA IMAM MUTTAQIN

Orang Rimba is a remote indigenous communities (KAT) that live in the forest in Jambi. However, since the inclusion of production forest land plantations (HTI) in the area of life Orang Rimba, they gradually affected. Orang Rimba often do not benefit from the development process.

The purpose of this study to reveal how political culture which is owned Orang Rimba. More specifically, the study reveals how the political orientation of the Orang Rimba to the object input and output in a land dispute HTI using qualitative description. The data collection was done by interview, observation and documentation.

These results indicate that, the type of political culture Orang Rimba belong to the type of subject - parochial. The mixed type is more likely to be dominated by parochial orientation. The characteristics of the political orientation of Orang Rimba no interest towards the objects of a broad political, except in relation to the values that are believed. Such as orientation to the land HTI Wana Perintis is based on the belief Orang Rimba, the land was their possession with signs of customary land.

Orang Rimba orientation towards political input object are characteristics parochial orientation. On the political orientation known that insight and awareness of passive political input. So as to influence the political system still has a dependency on the structures of political input to the environment in which they related narrowly. Then the orientation of the political output, Orang Rimba can assess with juice like it or not against government policies. However, it tends to be subjective assessment due to their cognitive aspects which are still dominated by the old values.

Keywords: Political culture, Orang Rimba, subject parochial

ABSTRAK

BUDAYA POLITIK ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS JAMBI

Oleh

KURNIA IMAM MUTTAQIN

Orang Rimba merupakan komunitas adat terpencil (KAT) yang hidup dalam hutan di Provinsi Jambi. Namun, sejak masuknya perkebunan lahan hutan produksi (HTI) yang berada di kawasan hidup Orang Rimba, lambat laun Orang Rimba terkena imbasnya. Orang Rimba seringkali tidak mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana budaya politik yang dimiliki Orang Rimba. Lebih khusus lagi, penelitian ini mengungkapkan bagaimana orientasi politik Orang Rimba terhadap objek input dan output dalam sengketa lahan konsesi HTI menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tipe budaya politik Orang Rimba tergolong pada tipe subjek – parokial. Tipe campuran tersebut lebih cenderung didominasi oleh orientasi parokial. Ciri-ciri orientasi politik Orang Rimba yang tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali yang

berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai tersebut didominasi oleh kepentingan adat istiadat. Seperti orientasinya terhadap lahan konsesi HTI Wana Perintis yang dilandasi oleh keyakinan Orang Rimba, bahwa lahan tersebut merupakan kepemilikan mereka dengan adanya tanda-tanda tanah adat.

Orientasi Orang Rimba terhadap objek input politik terdapat ciri-ciri orientasi parokial. Pada orientasi politik tersebut diketahui bahwa wawasan dan kesadaran terhadap input politik yang pasif. Sehingga untuk mempengaruhi sistem politiknya masih memiliki ketergantungan pada struktur-struktur input politik terhadap lingkungan dimana mereka terkait secara sempit. Kemudian orientasi terhadap output politiknya, Orang Rimba dapat menilai dengan perasaan suka atau tidak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, penilaiannya tersebut cenderung bersifat subjektif akibat aspek kognitif mereka yang masih didominasi oleh nilai-nilai lama.

Kata kunci: Budaya Politik, Orang Rimba, Subjek parokial.

**BUDAYA POLITIK ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT
DUABELAS JAMBI**

Oleh

KURNIA IMAM MUTTAQIN

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **BUDAYA POLITIK ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS JAMBI**

Nama Mahasiswa : **Kurnia Imam Muttaqin**

No. Pokok Mahasiswa : **1116021054**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

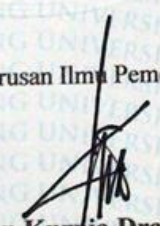
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Suwondo, M.A.

NIP 19590903 198503 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

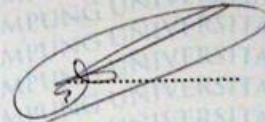

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.

NIP 19600729 199010 1 001

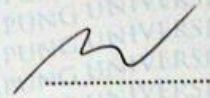
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Suwondo, M.A.**



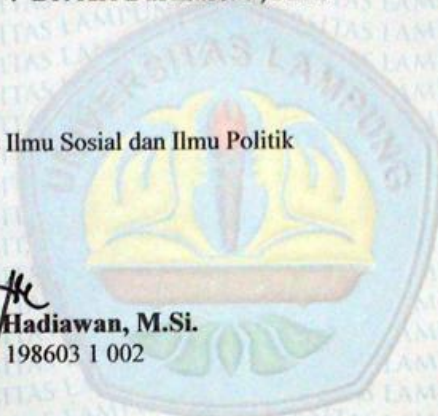
Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian : **14 Juni 2016**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi / Laporan Akhir ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Juni 2016

Yang membuat pernyataan



Kurnia Imam Muttaqin
NPM .1116021054

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 08 November 1992, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari Bapak Suharto Endang Jaya dan Ibu Supinar. Penulis menempuh pendidikan formal pertama di Taman Kanak-kanak Swadhipa Natar dan diselsaikan pada tahun 1999, dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Bumisari Natar yang diselsaikan pada tahun 2005, setelah itu dilanjutkan dengan pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Natar yang diselsaikan pada tahun 2008 dan pendidikan Menenganh Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang diselsaikan pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

*“Jauh berjalan banyak yang dilihat, lama hidup
banyak yang dirasa.”*

- Tan Malaka-

*“Keputusan terbaik dan ide terbaik selalu
datang di tempat yang tidak biasa, maka untuk
menjadi lebih baik, keluarlah dari zona nyaman
dan tempuhlah resiko.”*

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bismillahirrahmanirrahim, Ku persembahkan karya ilmiah ini untuk:

Mamah (Supinar), Papah (Suharto Endang Jaya), Aa' (Oktama Forestian) dan Mba' (Yuana Anjelinar). Serta ku persembahkan untuk “Anda” (iya, anda yang membaca).

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul *“Budaya Politik Orang Rimba Di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi”* Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Suwondo, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Penguji yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Abang Ricky Ardhian, yang telah menjadi mentor serta teman diskusi skripsi ini

6. KKI-WARSI selaku NGO yang mendampingi peneliti saat pengumpulan data skripsi ini.
7. Rombongan Orang Rimba Sungai Terap, terimakasih untuk kearifan mu, keindahan alam mu dan petualangan liar mu, niscaya jasmu abadi.
8. Tukang ojek di Simpang Pauh, Pak zul penghuni kopras OR wilayah Terap, Bang Ali dan keluarga, trimakasih sudah membantu, berdiskusi, kasih makan pada saat penelitian.
9. Kelompok bermain sekaligus saudara seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan (KOPROK), Ade Ngraha, Alm. Agung Annur Rahmat, Agus Sutiawan, Dio Baleri, Ekoman Suryadi, Endi Azis, Felik Genggam Anugrah, Kiki Syfdi Gustama, Meta Arlando, M. Jery Johans, M. Rendra Rinaldi, Rio Anggar Deni dan Prayoga Adi Putra. Serta teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan yang NPM nya diawali dengan angka 111.
10. Panitia seminar usul & hasil, tidak akan dilupakan: Wana Melina, Yuanita, Restia, Diki & Rendra.
11. Anggota-anggota; UKM-F PA Cakrawala, MAHUSA, MAHEPEL, MATALAM dan Mapala UNILA. Terimakasih telah berbagi dan bersama-sama mencari ilmu di kampus tercinta.
12. Penghuni serta Owner Warung KOPROK. Warung yang berada di dekat GSG Unila, kenanganmu abadi dimana kami lebih sering menghabiskan waktu (demi mendapat ilmu) disana ketimbang ruang kelas saat masa kuliah.

13. Terimakasih pada Organisasi formal maupun non formal yang pernah saya ikuti ; PORSARI (Paguyuban Onthel Rakyat Bumisari), Lampung Basecamp dan Lapan Corporate, kelak pengalaman mu berarti.
14. Dan terimakasih untuk “kamu”, yang telah memberi kasih dan sayang mu.

Penulis berdoa semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan, bantuan dan doa yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 21 Juni 2016

Penulis,

Kurnia Imam Muttaqin

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	ix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Budaya Politik	
1. Pengertian Budaya Politik	11
2. Tipe Budaya Politik	16
3. Partisipasi Politik.....	21
B. Tinjauan Hutan Tanaman Industri	24
C. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Informan	43
G. Teknik Pengolahan Data	44
H. Teknik Analisis Data	45
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum TNBD	49
B. Gambaran Umum Orang Rimba di TNBD	53
C. Sejarah Asal Usul Orang Rimba	58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Budaya Orag Rimba	61
1. Organisasi Sosial Orang Rimba	61
2. Sistem Kekerabatan.....	66
3. Pola Pemukiman dan Lingkungan	68
4. Mata Pencaharian	69
5. Pola Pemanfaatan Hutan	71

B. Orientasi Politik Orang Rimba Terhadap HTI Wana Perintis	73
1. Objek Politik Sengketa Lahan Konsesi HTI Antara Orang Rimba dengan PT. Wana Perintis	74
2. Orientasi Kognitif Orang Rimba	80
3. Orientasi Afektif Orang Rimba	89
4. Orientasi Evaluatif Orang Rimba.....	95
C. Tipe Budaya Politik Orang Rimba.....	100
1. Orientasi Terhadap Sistem Politik Sebagai Objek Umum.....	100
2. Orientasi Terhadap Objek Inpu Politikt	105
3. Orientasi Terhadap Objek OutputPolitik	108
 VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	117
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	32
2. Peta Persebaran Orang Rimba di TNBD.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Sebaran Komunitas Orang Rimba Di Dalam dan Di Luar Kawasan TNBD Menurut Kelompok dan Lokasi	56
2. Tabel Jabatan Penghulu Kelompok Terap	64
3. Tabel Perasaan Informan Terhadap Kemitraan Lahan Konsesi HTI...	93
4. Tabel Penilaian Informan Terhadap Kemitraan Lahan Konsesi HTI ..	95

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku politik seseorang antara lain dipengaruhi oleh faktor yang terkandung dalam dirinya seperti ideologi, kecerdasan dan kehendak hatinya. Bila seseorang menemukan kesesuaian perilaku politiknya dengan suasana lingkungan yang diinginkan, maka perilaku politiknya cenderung mencerminkan peranan yang positif, tetapi bila suasana lingkungan tidak selaras dengan apa yang terkandung dalam diri maka, perilaku politik seseorang akan menjadi negatif terhadap sistem politiknya. Istilah perilaku politik seseorang selanjutnya sangat terkait dengan konsep budaya politik. Kedua konsep ini tidak bisa terpisah antara satu dengan lainnya. Budaya politik lebih mencakup pada kebudayaan dari perilaku politik seseorang.

Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktur dan system politik. Kantaprawirja (2006:24) dalam membahas budaya politik mensatutemakan dengan struktur politik, karena berhubungan dengan fungsi konversi dan kapabilitas. Pembahasan tentang budaya politik perlu dikedepankan karena menyangkut disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena masyarakat.

Pembahasan mengenai budaya politik dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih mengenal ciri yang terpokok untuk menguji proses yang berlanjut dan yang berubah seiring dengan proses perkembangan. Memahami budaya politik berkaitan dengan karakteristik-karakteristik khas sebagai variabel untuk melihat perubahan sosial yang terjadi. Hal tersebut mengartikan budaya politik merupakan faktor yang memiliki nilai penting dalam pembahasan-pembahasan mengenai fenomena masyarakat.

Keanekaragaman bangsa Indonesia bukan hanya dalam budaya, tetapi juga dalam arti geografis yang memperkaya Indonesia. Masyarakat yang terdiri dari perbedaan suku, budaya, bahasa, kepercayaan dan agama dengan sendirinya keadaan ini telah memperluas ruang lingkup studi budaya politik. Bentuk budaya politik Indonesia merupakan sub-budaya nasional yang dibawa oleh pelaku-pelaku politik dari setiap kelompok budaya yang ada di Indonesia. Budaya politik menyatakan apakah warga negara diminta meninggalkan kesetiaan lokal dan mengarahkan kesetiaan itu ke negara, ataukah sub-budaya tetap diakui sebagai bagian dari budaya politik nasional, agar kepentingan mereka tetap terwakili didalamnya.

Studi mengenai budaya politik ini merupakan studi yang penting bagi upaya mengenali dan memahami karakter politik dari sebuah masyarakat. Pada negara yang tengah berada dalam fase demokratisasi, pemahaman yang menyeluruh terhadap karakter budaya politik masyarakatnya merupakan keutamaan. Pemahaman yang menyeluruh tersebut terkait dengan

pembangunan pondasi sistem politik yang baik. Pada konteks inilah studi budaya politik menemukan urgensinya.

Melihat kondisi kehidupan politik di Indonesia terutama dalam aspek budaya politik bila merujuk pada studi yang dilakukan Almond dan Verba, digambarkan bahwa terjadi interaksi antara nilai-nilai dan institusi tradisional dengan nilai-nilai demokrasi baru. Institusi tradisional dalam skala yang sangat kecil terutama di beberapa daerah Sumatra masih ikut memberi kontribusi dalam kancah politik lokal dan ikut menentukan karakter budaya politik setempat. Meskipun institusi lokal relatif kecil, namun nilai-nilai tradisional yang muncul di Indonesia pada era kerajaan-kerajaan ikut member warna hingga saat ini. Feodalisme merupakan salah satu warisan nilai yang muncul sampai saat ini, pada titik tertentu nilai tradisional ini sangat mempengaruhi budaya politik di Indonesia. Maka, dalam konteks kajian budaya politik di Indonesia terdapat keunikan-keunikan yang menambah daya tarik kajian.

Tingkat politik kenegaraan dengan kehadiran nilai-nilai tradisional dalam segala bentuk-bentuk telah menjadi penghambat bagi demokratisasi. Almond dan Verba (1984:7) menuliskan bahwa paling tidak ada dua faktor yang menghambat demokratisasi di negara-negara transisi demokrasi, satu diantaranya adalah masih dominannya nilai-nilai tradisional yang anti demokrasi dalam sebuah masyarakat Selanjutnya bila kita memperhatikan uraian Almond dan Verba mengenai budaya politik di Inggris, maka kita akan menjumpai bahwa budaya politik Inggris saat ini tidak dapat dilepaskan dari

proses sejarah perjalanan bangsa tersebut. Maka, bila kita kontekskan dengan kondisi Indonesia yang masing-masing masyarakatnya memiliki akar sejarah lokal yang berbeda-beda, tentu saja akan memunculkan budaya politik yang beranekaragam.

Orang Rimba merupakan salah satu masyarakat adat yang berada di pedalaman hutan Sumatra. Bagi pemerintah (Kementrian Sosial) ciri-ciri golongan masyarakat yang digambarkan seperti Orang Rimba adalah termasuk dalam golongan masyarakat terasing atau disebut sebagai KAT (Kelompok Adat Terpencil). Masyarakat terasing berdasarkan SK Menteri Sosial RI No. 5/1994 adalah kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal atau berkelana ditempat-tempat yang secara geografik terpencil, terisolir, dan secara sosial budaya terasing dan atau masih terkebelakang dibandingkan dengan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya.

Kelompok masyarakat terasing dengan ciri-ciri demikian diatas seperti Orang Rimba ini oleh Depsos dianggap sebagai suatu masyarakat yang rentan terhadap berbagai permasalahan sosial atau disebut sebagai rawan sosial dimana keadaan mereka dipandang labil atau tidak mempunyai ketidaktahanan sosial politik yang akan menimbulkan permasalahan sosial karena kebudayaan mereka yang dianggap tidak lagi sesuai dengan masanya karena terisolir, baik secara geografis maupun budaya.

Menurut UUD 1945 Pasal 18B (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, dan Pasal 28I (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Masyarakat adat Orang Rimba seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau tidak mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Sebagai warga negara, masyarakat adat harus menikmati hak dan kewajiban yang adil dan sejajar dengan masyarakat lainnya, masyarakat adat harus diberikan keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi kehidupannya.

Tahun 1980-an, terjadi proses kemerosotan ekosistem hutan Orang Rimba, menurut Rokhdian (2012:97) kawasan disekitar Cagar Biosfer Bukit Duabelas mulai dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sejak saat itu, ekosistem sekitar Cagar Biosfer Bukit Duabelas mendapat gangguan yang amat berat karena terjadi eksploitasi yang jauh melebihi daya dukung alam, dalam bentuk pengambilan kayu hutan yang dilanjutkan dengan perubahan fungsi menjadi hutan konversi berupa area perkebunan. Seperti tahun 1996 Perusahaan Wana Perintis mendapatkan SK dari Departemen Kehutanan pada 18 Desember 1996 melalui surat No. 781/Kpts-II/1996, dengan areal konsesi 6.900 ha yang berada di dua kabupaten yaitu Sarolangun dan Batanghari.

Kawasan yang diberikan pada PT Wana Perintis merupakan blok hutan tersisa di kawasan itu yang jauh sebelumnya sudah menjadi tempat hidup Orang Rimba. Dalam studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Ruang dan Sumberdaya yang dilakukan KKI-Warsi tahun 2003, bahwa blok hutan tersisa yang diberikan ke Wana Perintis memegang peranan penting untuk kelangsungan hidup Orang Rimba. Bagian utara daerah ini merupakan kawasan hidup Orang Rimba, yang sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum diberikan kepada Wana Perintis.

Menurut majalah Alam Sumatra edisi Juni 2015 mengenai konsesi lahan HTI Wana Perintis sebagai berikut:

“Perusahaan Wana Perintis tidak melakukan kegiatan apapun. Sehingga untuk sementara Orang Rimba tetap bisa nyaman hidup di kawasan ini. Sampailah pada tahun 2010, bencana itu datang. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan lahan terlantar. PP ini menegaskan bahwa kawasan yang sudah mendapat izin jika tidak dikelola sesuai dengan rencana kerjanya maka akan dianggap tanah terlantar dan kemudian akan dikembalikan kepada negara. Warning pengembalian tanah ini ke negara, seolah membangunkan Wana Perintis dari tidur panjangnya. Perusahaan yang dimiliki oleh taipan Jambi ini segera berbenah dengan menggandeng Incasy Raya, perusahaan ini segera tancap gas mengelola kawasan yang sebelumnya hanya di buka 200 hektar. Alat-alat berat segera sampai ke lokasi ini, hutan nan rimbun segera saja bertumbangan, hewan-hewan yang hidup di dalamnya yang menjadi pasokan protein Orang Rimba ikut menghilang.” (www.alamsumatera.org, edisi juni 2015, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015)

Orang Rimba merupakan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial-politik-budaya yang sangat khas. Maka seiring perjalanan sejarah Indonesia yang bergerak kearah kondisi modern termasuk di dalamnya modernisasi politik muncul beragam pertanyaan mengenai bagaimana Orang Rimba

mempertahankan eksistensi komunitas mereka. Terutama terkait dengan kerusakan hutan yang menjadi sumber penghidupan dan memiliki nilai kultural yang tinggi, lalu bagaimana mereka bersikap terhadap sistem politik di Indonesia. Sketsa di atas dan pertanyaan-pertanyaan di atas telah menarik perhatian penulis untuk mencoba melakukan kajian mengenai budaya politik Orang Rimba.

Penelitian mengenai budaya politik pada kelompok masyarakat yang masih tradisional di Indonesia pun pernah diteliti oleh Nia Kurniawati yang berjudul “Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwirdamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten” terdapat budaya politik pada masyarakat Suku Baduy. Tipe budaya politik pada Suku Baduy Kurniawati (2011:95) menyatakan, kecenderungan kearah tipe budaya politik parokial partisipan (*the parochial-participant political culture*) yang dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy Luar, dan tipe atau bentuk budaya politik subyek-parokial (*the parochial-subject political culture*) yang dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy Dalam.

Lantas bagaimanakah dengan budaya politik pada kelompok masyarakat tradisional lainnya seperti Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana budaya politik di kalangan Orang Rimba. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa menurunnya kualitas lingkungan hidup Orang Rimba akibat kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah. Maka bagaimana Orang Rimba mendistribusikan orientasi terhadap sistem politiknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana orientasi politik Orang Rimba terhadap lahan konsesi HTI Wana Perintis ?
2. Bagaimana tipe budaya Politik Orang Rimba wilayah timur Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas maka, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui orientasi politik Orang Rimba terhadap lahan konsesi HTI Wana Perintis.
2. Untuk mengetahui tipe budaya Politik Orang Rimba wilayah timur Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi ilmiah tentang Budaya politik yang ada di Indonesia.
2. Kegunaan praktis, Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi *stakeholders* dalam menyusun kebijakan publik yang berhubungan dengan pembangunan sosial politik Orang Rimba supaya terjalin keselarasan kehendak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan penulis akan menguraikan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dan teori tersebut adalah budaya politik, yakni setiap masyarakat atau individu memiliki ciri khas tersendiri dalam memandang sistem politiknya. Seperti tingkahlaku masyarakat atau individu dalam menyampaikan keinginan ataupun bagaimana mereka merespon kebijakan dari sistem politiknya.

Konsep mengenai budaya politik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan budaya politik yang ditawarkan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Pendekatan ini menyusun uraian mengenai bagaimana interaksi antara institusi tradisional serta nilai tradisional dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh ilmu pengetahuan. Maka pendekatan ini sesuai bila ingin diterapkan dalam penelitian budaya politik masyarakat tradisional Indonesia.

A. Budaya Politik

1. Pengertian Budaya Politik

Konsep budaya politik muncul untuk mengukur pola orientasi politik masyarakat yang ada dalam sistem politiknya, juga erat kaitannya dengan sikap dan tingkah laku individu dalam sistem politik. Menurut Sitepu (2012:163) menyatakan konsep budaya politik muncul, sejak tahun 1950 saat budaya politik (*political culture*) menjadi alat analisis dalam ilmu politik. Di bawah ini pengertian budaya politik menurut para ahli.

- a. Budiardjo (2008:58) budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.
- b. Kantaprawira (1999:26) budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan dan wewenang.
- c. Roy Macridis dalam Maksudi, (2012:49) budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan yang diterima bersama.
- d. Widjaja (1988:250) budaya politik menyangkut masalah sikap dan norma. norma membentuk sikap normatif seseorang terhadap suatu gejala-gejala; benar atau salah, baik atau buruk, suka atau tidak suka.

Berdasarkan pengertian budaya politik di atas, mengartikan suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politik kita menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Menurut Almond dan Sidney Verba (1984:14) budaya politik dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan matang di lingkungan masyarakat terutama mengacu

pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut.

Indikator budaya politik merupakan pernyataan untuk menyampaikan sikap dan perasaan terhadap sistem politik itu berlangsung. Menurut Pye (dalam Kavanagh, 1982:11) indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti, wawasan politik, sebagaimana hubungan antara tujuan dan cara setandar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik. Indikator-indikator budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai.

Almond dan Verba (1990:16) mendefinisikan budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa tersebut. Selanjutnya Almond merumuskan pola orientasi politik, rumusan ini didasarkan pada rumusan yang diajukan Talcott Parsons dan Edward A. Shils. Berikut tiga orientasi politik tersebut;

- a. Orientasi kognitif, pengetahuan tentang sistem politik dan kepercayaan pada sistem politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya.
- b. Orientasi afektif, perasaan terhadap sistem politik, peranannya dan penampilannya.

- c. Orientasi evaluatif, keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Orientasi kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan individu terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.

Orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluative menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu didalamnya.

Agar dapat diperoleh pendekatan dan gambaran yang tepat tentang orientasi individu terhadap budaya politik, perlu dilakukan pengetahuan tentang informasi mengenai pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu objek pokok politik. Adapun objek-objek

orientasi tersebut Almond dan Sidney Verba (1984: 20) menjabarkan bagian-bagian sistem politik meembedakan tiga golongan objek:

- a. Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif dan birokrasi.
- b. pemegang jabatan; seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator.
- c. kebijaksanaan, keputusan, atau penguatan keputusan, struktur pemegang jabatan dan struktur secara timbal balik dapat diklasifikasi apakah mereka termasuk dalam proses atau input politik atau dalam proses administratif atau output.

Almon dan Verba (dalam Kavanagh 1982:12) telah mengklasifikasi orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif siakap terhadap objek politik untuk menggambarkan suatu tipology budaya politik yang ideal, orang-orang yang ikut terlibat, subyek dan daerah. Orientasi itu positif bagi semua obyek, mereka mengatakan bahwa budaya politik itu adalah hal yang turut berpartisipasi. Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat.

Orientasi-orientasi individual dalam masyarakat terhadap sistem politik, dapat dijadikan arah penentuan tipe kebudayaan politik suatu masyarakat. Untuk menentukan orientasi tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara sistematis. Almond dan Sidney Verba (1984:18) menggolongkan dimensi orientasi politik sebagai berikut:

- a. sistem sebagai objek umum meliputi, pengetahuan individu terhadap sistem politik, baik mengenai pengertian sistem politik yang dianut di negaranya, sejarah, sifat-sifat konstitusi dan pengetahuan umum lainnya yang menyangkut sistem politik di negara bersangkutan.
- b. Objek-objek input meliputi, pemahaman individu mengenai input sistem politik, seperti pengetahuan mengenai struktur dan peranan elit politik serta mekanisme pengajuan-pengajuan tuntutan politik atau pengajuan kebijaksanaan politik. Kemudian perasaan-perasaan individu mengenai struktur elite beserta proposal kebijaksanaan yang mereka ajukan ke sistem politik.
- c. Objek-objek output meliputi, pemahaman individu mengenai output sistem politik, seperti pemahaman mengenai kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh sistem politik. Juga mengenai mekanisme pemunculan kebijakan-kebijakan tersebut serta mengenai perasaan mereka terhadap dampak yang dirasakan dari kebijakankebijakan yang dikeluarkan sistem politik.
- d. Pribadi sebagai objek, menyangkut argumentasi individu mengenai perasaannya sebagai bagian dari sistem politik. Lalu pengetahuan mereka terhadap hak-hak, kewajiban serta strategi-strategi individu untuk melakukan tekanan atau mempengaruhi sistem politik.

Realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui penelitian mereka di lima negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat tiga budaya politik yang dominan terdapat di tengah individu. Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik masyarakat.

2. Tipe Budaya Politik

Budaya politik suatu masyarakat berbeda dengan budaya politik masyarakat lain, Perbedaan ini dapat diklasifikasikan dari tipe-tipe budaya politik. Budaya politik pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh sosial, budaya, ideologi, ekonomi, dan kondisi geografisnya. Almond dan Sidney Verba telah mengkalifikasikan tipe budaya politik yaitu, parokial, subjek, pastisipan dan campuran.

a. Budaya Politik Parokial

Almond dan Sidney Verba (1984: 20) menyatakan orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komperatif yang diinisiasikan oleh sistem politik. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif yang rendah. Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapanharapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik.

Pada kebudayaan politik parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit. Budaya politik parokial yang kurang lebih bersifat murni merupakan fenomena umum yang biasa ditemukan didalam

masyarakat-masyarakat yang belum berkembang, dimana spesialisasi politik sangat minimal. Menurut Almond dan Verba (1984:21) secara relatif parokialisme murni itu berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang yang minim. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif ketimbang kognitif.

b. Budaya Politik Subjek/Kaula

Orientasi kaum subyek/kaula terhadap obyek politik dapat dilihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap permusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek output. Menurut Almond dan Verba (1984:21) budaya politik subyek/kaula memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (input) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (output) sangat rendah.

Menurut Kantaprawira (2006:33) budaya politik Subjek/kaula adalah, dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, dan mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output, sedangkan perhatiannya atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi subyek dalam sistem politik yang telah mengembangkan

perantara-perantara demokrasi lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.

Orientasi subjek menganggap dirinya tidak berdaya memengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya. Segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik dianggap sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi apa lagi ditantang. Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek/kaula, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah dan keberdayaan politik yang rendah. Sehingga, sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

c. Budaya Politik Partisipan

Pada kaum partisipan dimana perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi. Tipe budaya politik partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Menurut Almond dan Verba (1984:22) tipe budaya politik partisipan merupakan bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap aspek input maupun output dari sistem itu.

Budaya politik partisipan masyarakat merealisasi dan memergunakan hak-hak politiknya, dengan demikian masyarakat dalam budaya politik partisipan tidak begitu saja menerima keputusan politik. Kemudian masyarakat ini akan menyadari hak dan kewajibannya serta memergunakan secara aktif. Mereka akan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik terhadap sistem sebagai totalitas, *input* dan *output* maupun terhadap posisi atau peran dirinya sendiri.

d. Budaya Politik Campuran

Budaya politik dapat diartikan sebagai campuran orientasi warga negara, merupakan campuran partisipan, subyek, dan parokial. Pada setiap bangsa budaya politik itu tidak terpaku kepada satu budaya, walaupun di negara maju, namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada yang kaula dan parokial, inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik campuran. Kombinasi antara tiga tipe budaya politik diatas dapat membentuk tipe-tipe budaya politik campuran.

Secara konseptual menurut Almond dan Verba (1984: 27-31), terdapat tiga tipe budaya politik campuran, yaitu:

1. Kebudayaan subyek – parokial, adalah tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukaan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetian terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintah pusat yang bersifat khusus.

2. Kebudayaan parokial – partisipan, terdapat masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di sejumlah negara yang sedang berkembang. di negara tersebut budaya politik yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan; demi keselarasan, mereka menuntut suatu kultur partisipan.
3. Kebudayaan partisipan – subyek, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis, sementara sisa penduduk lainnya terus diorientasikan ke arah suatu struktur pemerintahan otoritarian dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi pribadi yang pasif.

Budaya politik campuran merupakan percampuran dari ketiga budaya politik, antara parokial, kaula, dan partisipan. Adanya tipe politik campuran ini dikarenakan bahwa orientasi terhadap satu tipe tertentu tidak menggantikan tipe yang lain. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.

Terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, pendekatan budaya politik Almond dan Verba akan digunakan sebagai acuan dalam memahami orientasi politik Orang Rimba. Peran kebudayaan politik sebagai rantai penghubung antara mikro dan makro politik, tentu sangat tepat pijakan teori budaya politik ini digunakan dalam penelitian ini, karena pada titik mikro penelitian ini mencoba memahami orientasi politik Orang Rimba terhadap lahan konsesi HTI Wana Perintis.

Pendekatan budaya politik yang disampaikan Almond dan Verba memang cenderung berbicara dalam lingkup negara, artinya budaya politik secara luas pada sebuah negara. Tetapi pada bagian pengantar (1984:1-5) disebutkan bahwa pendekatan budaya politik dapat digunakan untuk mengkaji kebudayaan politik dalam lingkup komunitas tertentu. Hingga secara teoritis pendekatan budaya politik Almond dan Verba ini bisa digunakan untuk melihat budaya politik Orang Rimba.

3. Partisipasi Politik

Kajian mengenai perilaku politik cenderung mengaitkan diri dengan partisipasi politik. Surbakti (1992:141) menguraikan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada umumnya dibagi dua, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Maka dapat dikatakan partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik belum tentu merupakan partisipasi politik.

Adapun kriteria sebuah perilaku politik termasuk dalam partisipasi politik atau tidak, Surbakti (1992:141) menyebutkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap atau orientasi.

- b. Partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku politik yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk dalam kategori ini adalah kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksanaan keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau menolak keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- c. Kegiatan yang berhasil dalam mempengaruhi pemerintah maupun yang gagal termasuk dalam partisipasi politik.
- d. Partisipasi politik dapat berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung.
- e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan kegiatan yang sesuai prosedur dan tanpa kekerasan ataupun dengan aktivitas yang tidak sesuai prosedur dan menggunakan kekerasan.

Partisipasi politik ini menurut Surbakti juga terbagi dalam dua macam.

Pertama adalah partisipasi yang muncul karena kesadaran diri dan yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar desakan, manipulasi dan paksaan dari pihak lain (*mobilisasi*). Surbakti, (1992:142) Partisipasi sebagai kegiatan dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif ialah kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang disusun pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi aktif cenderung berorientasi pada input (masukan) dan output (keluaran) dari sistem politik, sedangkan partisipasi pasif cenderung hanya berorientasi pada output semata. Di samping itu juga terdapat golongan masyarakat yang tidak termasuk dalam partisipasi aktif maupun

pasif, yaitu mereka yang menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan.

Goel dan Olsen (dalam Sastroatmodjo, 1995:77) menggunakan tingkat partisipasi politik sebagai stratifikasi sosial dengan membagi enam golongan masyarakat terkait dengan partisipasi politik, yaitu pemimpin politik, aktivis politik, komunikator politik, warga negara marjinal, dan orang-orang yang terisolasi (jarang melakukan partisipasi politik).

Milbrath dan Goel dalam Ramlan Surbakti membedakan tingkat partisipasi menjadi empat kategori. Apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. Kategori kedua adalah spektator, kategori ini adalah orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilu. Ketiga adalah tipe transisional, artinya mereka yang tidak secara langsung menjadi aktor politik tetapi memiliki hubungan yang dekat dengan aktor politik dan aktif menghadiri diskusi-diskusi politik. Tipe keempat adalah tipe gladiator, merupakan aktor utama dalam politik, bisa merupakan seorang pemimpin partai politik, calon untuk duduk dalam jabatan politik dan sebagainya yang sifatnya berhubungan langsung dengan kepentingan politik.

Huntington dan Joan Nelson (1994:9) membagi partisipasi politik menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) atau self motion. Tipe lainnya adalah partisipasi yang dikerahkan (*mobilized participation*), partisipasi tipe ini disebabkan karena dikerahkan oleh pihak lain. Dalam konteks partisipasi politik di

Indonesia Arbi Sanit (1985:94-95) membagi partisipasi politik dari aspek tujuan. Pertama partisipasi politik yang bertujuan memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah. Kedua, partisipasi politik yang berusaha menguraikan kelemahan dari sistem politik dan juga pemerintah dan yang ketiga adalah partisipasi politik dalam bentuk tantangan politik secara langsung terhadap pemerintah. Samuel Huntington (1994) juga menyebutkan dalam Negara berkembang seperti Indonesia kemungkinan partisipasi politik yang terbentuk adalah pseudo participation (partisipasi semu), yaitu partisipasi yang lebih dominan dikarenakan faktor eksternal atau mobilisasi politik.

B. Tinjauan Hutan Tanaman Industri

Hutan tanaman industri atau HTI adalah sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri, yaitu tanaman berkayu dengan tipe sejenis untuk mencapai tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami. Menurut Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1990, HTI adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Adapun tujuan pembangunan HTI menurut Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman, 2009 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi/*pro-growth*), penyediaan lapangan kerja (*pro-job*), pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan (*pro-poor*) dan perbaikan kualitas lingkungan hidup (*pro-environment*).
2. Mendorong daya saing produk industri perkayuan (penggergajian, kayu lapis, *pulp* dan *paper*, *meubel* dan lain-lain) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Permenhut P. 20/kpts-II/2007 juncto Permenhut P. 11/kpts-II/2008 areal HTI diusahakan di areal hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya. Hutan produksi yang tidak produktif sendiri merupakan hutan yang dicadangkan oleh Menteri Kehutanan sebagai areal pembangunan hutan tanaman jadi tidak selalu harus merujuk misalnya pada kawasan hutan produksi yang sudah terdegradasi. Pencadangan ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Jangka waktu IUPHHK-HTI diberikan dalam jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 35 tahun. Dan setelahnya tidak ada lagi perpanjangan izin. Evaluasi dilakukan oleh Menteri Kehutanan setiap 5 tahun sekali. Pejabat Pemberi Ijin IUPHHK-HTI diberikan oleh Menteri Kehutanan setelah mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh pemohon izin. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pemberian ijin IUPHHK-HTI:

- a. Dirjen Bina Produksi Kehutanan
- b. Kepala Badan Planologi Kehutanan
- c. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat provinsi
- d. Kepala Dinas yang berwenang di bidang kehutanan di tingkat kabupaten/kota
- e. Balai Pemantapan Kawasan Hutan

Pemohon ijin Ada 4 institusi yang bisa mendapatkan ijin IUPHHK-HTI:

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- d. Badan Usaha Milik Daerah.

Persyaratan Pemohon ijin Persyaratan permohonan untuk mendapatkan IUPHHK-HTI terdiri dari :

- a. Surat permohonan kepada Menhut dengan tembusan kepada Dirjen BPK, Kepala Baplan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
- b. Persyaratan administrasi dan teknis

Sementara, persyaratan untuk mendapatkan ijin perluasan areal kerja, terdiri dari:

- a. Surat permohonan kepada Menhut dengan tembusan kepada Dirjen BPK, Kepala Baplan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

- b. Lampiran berupa: [a] Kepmenhut tentang pemberian ijin IUPHHK-HTI; [b] Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota yang didasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota bahwa lokasi yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri dengan peta lokasi; [c] Persyaratanteknis.

Lama waktu mendapatkan ijin berdasarkan peraturan tersebut diperlukan waktu sekurang-kurangnya 80 hari kerja seorang pemohon bisa mendapatkan surat ijin IUPHHK-HTI. Ini di luar waktu yang diperlukan oleh pemohon untuk mendapatkan persetujuan Amdal atau UKL/UPL.

Menurut Departemen Kehutanan (1996) pemegang izin HTI berkewajiban memabangun HTI di areal kerjanya yang telah ditetapkan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut.

1. Membuat Rencana Karya Pengusahaan HTI selambat-lambatnya delapa belas bulan setelah terbitnya SK. HPHTI.
2. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI sesuai pedoman.
3. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya.
4. Mengelola areal pengusahaan HTI berdasarkan Rencana Karya dan ketentuan di bidang kehutanan yang berlaku.
5. Membayar iuran HPHTI dan iuran hasil atas hutan yang dipungut dari areal kerjanya.

6. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun sejak terbit SK HPHTI, pemegang hak membuat tanaman sidikit-dikitnya sepersepuluh dari luas areal yang diberikan.
7. Selambat-lambatnya jangka waktu 25 tahun seluruh HPHTI yang telah diberikan harus ditanami.
8. Segera menanam kembali setelah melakukan penebangan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Untuk mempekerjakan secukupnya tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi persyaratan menurut penilaian menteri di bidang perencanaan hutan, sivikultur dan pengelolaan hutan
10. Kewajiban membina masyarakat di dalam dan di sekitar arealnya

Hak Pengusahaan HTI dapat dicabut apabila:

1. Pemegang izin HTI tidak melaksanakan secara nyata selambat-lambatnya dalam dua belas hari sejak terbitnya SK. HPHTI.
2. Pemegang izin HTI tidak menyerahkan Rencana Karya Pengusahaan HTI dan/atau Rencana Karya Tahunan HTI selambat-lambatnya delapan belas bulan sejak terbitnya SK. HPHTI atau sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemegang HPHTI menghentikan pekerjaannya dan meninggalkan arealnya selama 24 bulan terus-menerus sebelum HPHTI berakhir.
4. Pemegang HPHTI tidak membayar iuran hasil hutan terhadap hasil hutan yang telah diambil dari areal kerjanya.

5. Berdasarkan penilaian Menteri Kehutanan setelah lebih dari lima tahun sejak diterbitkan SK. HPHTI pembangunan HTI yang dilaksanakan tidak berhasil karena kelalaian yang bersangkutan.
6. Pemegang HPHTI dalam jangka waktu paling lama 24 bulan tidak melaksanakan kegiatan penanaman setelah penebangan.

Kawasan yang diberikan pada PT Wana Perintis merupakan blok hutan tersisa di kawasan itu yang jauh sebelumnya sudah menjadi tempat hidup Orang Rimba. Dalam studi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Ruang dan Sumberdaya yang dilakukan KKI-Warsi (Siaran pers WARSI,2003) bahwa blok hutan tersisa yang diberikan ke Wana Perintis memegang peranan penting untuk kelangsungan hidup Orang Rimba. Bagian utara daerah ini merupakan kawasan hidup Orang Rimba, yang sudah berlangsung sejak lama, jauh sebelum diberikan kepada Wana Perintis. Bagaimana Orang Rimba memandang fenomena tersebut. dalam penelitian ini akan menganalisis orientasi politik Orang Rimba khususnya HTI Wana Perintis.

C. Kerangka Pikir

Budaya politik merupakan orientasi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam merespon setiap objek dan proses politik yang telah, sedang dan akan terjadi. Budaya politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya politik Orang Rimba wilayah timun TNBD. Almond dan Verba (1990:16)

budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa tersebut. Orientasi khusus tersebut terdapat tiga komponen yakni orientasi kognitif, afektif dan evaluatif.

Setelah mengetahui ketiga komponen tersebut barulah dapat mengklasifikasikan tipe budaya politik. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan hal-hal seputar budaya politik Orang Rimba. Dalam konteks budaya politik sesuai dengan landasan teoritis berdasar kebudayaan politik Almond dan Verba penelitian ini berusaha untuk mengetahui orientasi politik Orang Rimba terhadap konsesi lahan HTI Wana Perintis.

Sebagai kelompok masyarakat dengan mengandalkan suberdaya hutan sebagai penghidupan. Kawasan konsesi HTI Wana Perintis merupakan blok hutan tersisa di kawasan itu yang jauh sebelumnya sudah menjadi tempat hidup Orang Rimba. Untuk mengetahui orientasi politik Orang Rimba sebagai acuan objek politik yaitu mengenai sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis sebagai berikut:

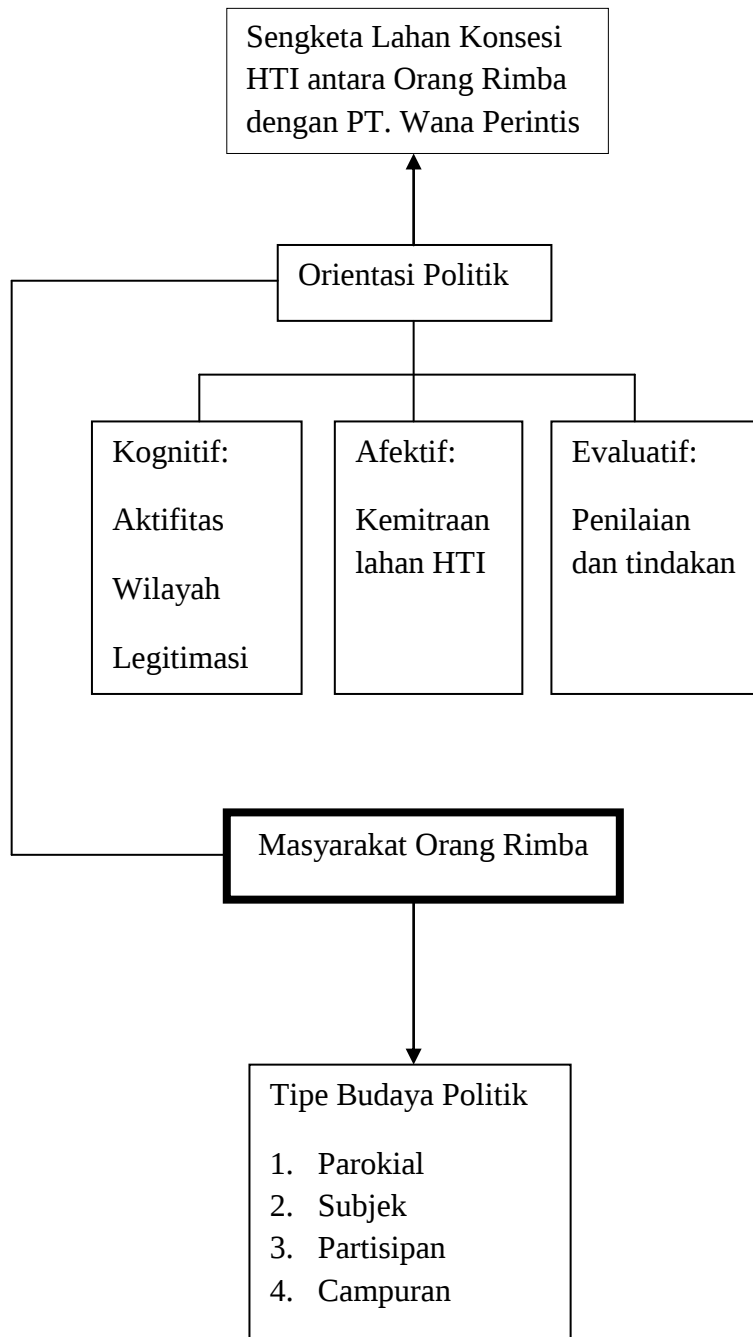
1. Kognitif meliputi pengetahuan terhadap aktifitas-aktifitas perusahaan Wana Perintis di lahan konsesi HTI, pengetahuan terhadap wilayah lahan konsesi HTI dan legitimasi oleh pemerintah
2. Afektif meliputi perasaan terhadap pola kemitraan perkebunan dengan PT. Wana Perintis yang secara legal diatur dalam undang-undang

3. Evaluatif meliputi penilaian dan tindakan Orang Rimba mengenai fenomena sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis.

Setelah mengetahui orientasi politik Orang Rimba, kemudian dapat mengkalisifikasi tipe budaya politik meliputi budaya politik parokila, subjek, partisipan dan tipe campuran. Ungkapan para informan Orang Rimba dan observasi penulis mengenai orientasi politiknya dapat menjadi acuan dalam menganalisa tipe budaya politik. berikut indikator dalam mengkalisifikasi tipe budaya politik dalam penelitian ini:

1. Sistem sebagai objek umum yaitu bagaimana tingkat pengetahuan, perasaan dan penilaian informan terhadap aktifitas-aktifitas HTI Wana Perintis dan wilayah konsesi.
2. Input objek politik yaitu, cara informan mempengaruhi sistem politik dalam hal bagaimana Orang Rimba menyelesaikan sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis
3. Output objek politik yaitu, tingkat kesadaran akan adanya otoritas pemerintah sebagai pemberi kebijakan atas fenomena sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis.

Untuk lebih memahami penelitian ini, maka akan disajikan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai budaya politik Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan budaya politik Orang Rimba dengan pendekatan teori budaya politik Almond dan Verba, yang pada dasarnya mereka menggunakan data kuantitatif dalam menggambarkan budaya politik. Adapun alasan menggunakan metode kualitatif sebagai berikut:

1. Awalnya penulis menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif pada penelitian ini. Namun pada saat pengambilan data penelitian, Orang Rimba sendiri dengan segala keterbatasan baca tulis dan pemaknaan bahasa Indonesia, maka tidak tepat jika pengambilan data menggunakan cara kuantitatif.

2. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini memang tidak sama dengan pendekatan yang digunakan Almond dan Verba dalam menggambarkan budaya politik. Pada pendekatan yang digunakan Almond dan Verba, subjek penelitian mereka memenuhi syarat untuk pengambilan data dengan kuantitatif, yaitu masyarakat lebih maju ketimbang subjek pada penelitian ini. Almond dan Verba membandingkan tingkat budaya politik pada lima negara meliputi masyarakat, Inggris, Amerika, Prancis, Italia dan Meksiko. Sedangkan Orang Rimba pada penelitian ini tidak dibandingkan budaya politiknya dan juga pada taraf pengambilan data lebih valid dengan cara kualitatif, karena keterbatasan Orang Rimba dalam teknik baca maupun tulis.
3. Teknik dalam penelitian kualitatif selain dapat menjawab tujuan penelitian ini juga memudahkan peneliti dalam pengambilan data. Karena metode kualitatif memiliki kesamaan dengan kebudayaan Orang Rimba dimana mereka tidak terbiasa dengan baca tulis, sehingga wawancara mendalam dapat mengambil data secara tepat.

Menurut Herdiansyah (2010:47) penelitian kualitatif memiliki tahapan-tahapan yang di jadikan patokan dalam penelitian, walaupun belum di tentukan patokan yang baku dan berlaku umum, tetapi menurut beberapa ahli penelitian kualitatif ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian kualitatif, tahapan tahapan itu adalah:

- a. Mengangkat permasalahan: permasalahan yang timbul dalam penelitian kualitatif biasanya merupakan permasalahan yang sifatnya unik, khas, memiliki daya tarik tertentu, spesifik dan terkadang sangat bersifat

- individual. Terkadang dalam penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan ke-urgent-an penelitian seperti pada kuantitatif;
- b. Memunculkan pertanyaan penelitian: pertanyaan penelitian merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian merupakan “spirit” dari penelitian kualitatif;
 - c. Mengumpulkan data yang relevan: data merupakan sesuatu yang penting dalam penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, data pada penelitian kualitatif umumnya berupa kumpulan data, kumpulan kalimat, kumpulan pertanyaan, atau uraian yang mendalam;
 - d. Melakukan analisis data: analisis data merupakan langkah berikutnya setelah data relevan diperoleh. Analisis data dilakukan manual, akan tetapi seiring berjalannya waktu analisis data juga dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak komputer.
 - e. Menjawab pertanyaan penelitian: tahapan ini adalah tahapan terakhir dalam penelitian. Hasil analisis data yang dilakukan kemudian dikaitkan kembali dengan fenomena di angkat untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merujuk pada Orang Rimba yang hidup di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, dimana berdasarkan pengelompokan tempat tinggalnya terbagi ke dalam empat kelompok besar berdasarkan penamaan sungai : Orang Rimba kelompok Kejasung di sisi utara, Air Hitam di sisi selatan, sungai Terap/Serengam di sisi timur dan Makekal di sisi barat. Setiap

kelompok tersebut terbagi lagi kedalam sub-sub kelompok berdasarkan anak sungai. Secara administratif kawasan ini masuk kedalam tiga wilayah Kabupaten yakni, Sarolangun, Tebo dan Batanghari. Subjek penelitian ini adalah Orang Rimba di wilayah timur TNBD yang termasuk wilayah kelompok Terap. Pemilihan kelompok Terap dilandasi oleh terdapatnya sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis pada wilayah timur TNBD.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan guna untuk memperjelas ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian juga untuk memberi panduan bagi peneliti selama di lapangan, hingga peneliti tidak terlalu disulitkan dengan datum-datum yang terlalu banyak hingga akan mempersulit analisa data. Meski demikian fokus penelitian tidak mengikat secara mutlak peneliti, karena fokus penelitian bersifat tentatif atau sementara.

Penelitian ini juga menyusun fokus penelitian, untuk mempermudah peneliti di lapangan serta untuk membatasi studi dalam penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini untuk melihat tipe budaya politik Orang Rimba dengan pendekatan teori Almond dan Verba, maka dalam analisis penelitian ini meliputi orientasi politik kognitif, afektif dan evaluatif terhadap fenomena sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis dengan Orang Rimba sebagai objek politiknya, berikut uraian fokus penelitian:

Pertama penulis menyajikan gambaran orientasi politik Orang Rimba terhadap sengketa konsesi HTI, meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif. Aspek kognitif, membahas tentang aktivitas-aktivitas, wilayah dan legitimasi HTI Wana Perintis. Aspek afektif mengenai kemitraan lahan antara Orang Rimba dengan PT. Wana Perintis. Kemudian Aspek evaluatif membahas mengenai penilaian dan tindakan Orang Rimba dalam sengketa tersebut.

Kedua, setelah mendapat gambaran tentang orientasi politiknya, Penulis menganalisis tipe budaya politik berdasarkan data dari orientasi politik Orang Rimba terhadap sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis. Sesuai dengan tinjauan teori yang digunakan, maka dalam mengklasifikasikan tipe budaya politik, sebagai berikut.

1. Sistem sebagai objek umum, memaparkan orientasi politik Orang Rimba yang bersifat umum, seperti bagaimana pengetahuan tentang kronologi sengketa, pengetahuan mengenai pemerintah, wilayah sengketa dan wawasannya dalam pengetahuan legitimasi pemerintah dalam kaitanya sengketa lahan konsesi HTI.
2. Objek input, memaparkan orientasi politik Orang Rimba tentang bagaimana mereka mempengaruhi sistem politik meliputi, bagaimana mereka mengajukan tuntutan untuk mempengaruhi hasil kebijakan, dengan cara apa mereka melakukannya dan bagaimana kecenderungan mereka terhadap kelompok kepentingan.
3. Objek output, memaparkan orientasi politik Orang Rimba tentang bagaimana mereka menanggapi kebijakan yang dibuat pemerintah,

khususnya kebijakan kemitraan yang dianggap sebagai solusi sengketa oleh pemerintah dan bagaimana tindakan Orang Rimba terkait kebijakan tersebut.

Analisis orientasi terhadap objek politik diatas akan mengkalasifikasi kecenderungan tipe budaya politik Orang Rimba. Sesuai denga tinjauan teori yang digunakan yaitu, teori budaya politik menurut Almond dan Verba. Orang Rimba akan dianalisis kecenderunga tipe budaya politik, apakah mereka tergolong pada tipe parokial, subjek, partisipan atau tipe campuran. Adapun yang menjadi indikator dalam mengklasifikasi tipe budaya politik Orang Rimba, dapat diketahui dari ciri-cirinya, sebagai berikut.

1. Budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit. Karena orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup atau wilayah tempat ia tinggal, dengan kata lain, persoalan diluar wilayahnya tidak diperdulikannya.

Ciri-ciri budaya politik parokial :

- a. Warga negara tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali yang ada disekitarnya.
 - b. Warga negara tidak banyak berharap terhadap system politik yang ada.
 - c. Belum adanya peran-peran politik yang khusus.
2. Budaya politik subjek, masyarakat atau individu yang bertipe budaya politik subjek telah memiliki perhatian dan minat terhadap sistem politik. Hal ini diwujudkan dengan berbagai peran politik yang sesuai dengan

kedudukannya. Akan tetapi peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat, Individu atau masyarakat hanya menerima aturan tersebut secara pasrah.

Ciri-ciri budaya politik subjek atau kaula :

- a. Warga menaruh kesadaran, minat dan perhatian terhadap sistem politik pada umumnya dan terutama terhadap obyek politik output, sedangkan kesadaran terhadap input rendah.
 - b. Warga menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah.
 - c. Masyarakat tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah dan tidak berdaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusannya.
 - d. Warga bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi apalagi ditentang.
3. Budaya politik partisipan merupakan budaya politik yang sangat ideal. Dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas. Masyarakat mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik) maupun proses output (pelaksanaan, penilaian dan pengkritik setiap kebijakan dan keputusan politik pemerintah).

Ciri- ciri budaya politik Partisipan:

- a. Anggota masyarakat sangat berpartisipasi terhadap semua obyek politik, baik menerima atau menolak suatu obyek politik.

- b. Kesadaran bahwa masyarakat adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.
- c. Warga negara menyadari akan peran, hak, kewajiban dan tanggung jawabnya selaku warga negara.
- d. Tidak menerima begitu saja keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua obyek politik.
- e. Warga harus mampu bersikap terhadap masalah atau isu politik
- f. Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen lainnya serta data yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga macam teknik, yaitu :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan dilakukan secara lentur dan longgar, agar dapat menggali dan menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa informan pada waktu oprasional penelitian sejak 19 Oktober s.d 20 November 2015 dengan beberapa informan diantaranya kepada:

- a. Temenggung, Depati, Mengku dan Menti komunitas Orang Rimba Kelompok Sungai Terap di pemukiman atau wilayah Orang Rimba bagian timur TNBD.
- b. Masyarakat Orang Rimba seperti Pemuda, tokoh yang dituakan dan salahsatu ketua keluarga komunitas Orang Rimba di pemukiman atau wilayah Orang Rimba bagian timur TNBD.
- c. Fasilitator Orang Rimba wilayah tumur TNBD di kantor cabang KKI Warsi yang berlokasi di wilayah timur TNBD kabupaten Sarolangun.
- d. Staf ahli Warsi bagian suku dan budaya di kantor pusat KKI Warsi yang berlokasi di kota Jambi.

- e. Beberapa warga Desa Jelutih yang sering berinteraksi dengan Orang Rimba dan salah satunya merupakan keturunan Orang Rimba yang telah keluar dari adat.

2. Observasi

Observasi dilakukan guna memperoleh data dan informasi mengenai budaya politik Orang Rimba, di samping itu observasi juga dimaksudkan untuk mengamati dan mencermati peristiwa keseharian Orang Rimba dalam orientasi politik terhadap HTI Wana Perintis. Observasi dilakukan pada saat penelitian, yaitu 19 Oktober s.d 20 November 2015. Rincian observasi yang dilakukan oleh penulis segai berikut:

- a. Penulis dengan didampingi oleh KKI Warsi mengikuti rutinitas sehari-hari Orang Rimba pada kelompok Sungai Terap, seperti menjelajahi hutan wilayah timur TNBD serta kegiatan pemburuan binatang liar untuk dikonsumsi.
- b. Melakukan program pendidikan untuk Orang Rimba oleh KKI Warsi.
- c. Ikut mendampingi Orang Rimba dalam mengajukan tuntutan kepada pihak PT. Wana Perintis atas klaim tanah adat.
- d. Mengikuti musyawarah yang dilakukan Orang Rimba dengan KKI Warsi sebagai organisasi yang mengadvokasi hak-hak Orang Rimba.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari dokumen, arsip dan berbagai laporan mengenai aktivitas politik Orang Rimba dan juga catatan-catatan yang berkaitan dengan objek politik dalam penelitian ini.

Adapun dokumen-dokumen yang menjadi bahan olahan data sebagai berikut:

- a. Dokumen KKI Warsi mengenai sejarah Orang Rimba dalam Waintre 2013
- b. Dokumen populasi dan peta persebaran Orang Rimba di TNBD
- c. Dokumen status lahan penyangga daerah sekitar TNBD (oleh Warsi, tidak dipublikasi)
- d. Dokumen laporan dan catatan harian milik anggota fasilitator KKI Warsi untuk Orang Rimba wilayah timur TNBD, khususnya catatan mengenai sengketa lahan konsesi HTI dari tahun 2010-2015 (tidak dipublikasi).
- e. Undang-undang yang berkaitan dengan sengketa lahan konsesi meliputi, SK MenHut No. 10.1/Kpts-II/2000, SK MenSos No. 5/1994, SK MenHut No. 781/Ktps-II/1996, PP No. 7 Tahun 1990, PP No. 11 Tahun 2000 dan SK MenHut dan Perkebunan No. 258/Ktps-II/2000.
- f. Penelitian KKI Warsi tahun 2003. Kebijakan Dalam Pemanfaatan Ruang Dan Sumberdaya (tidak dipublikasi)

F. Informan

Informan atau narasumber adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sampel dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi atau sampel. untuk menentukan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Teknik ini ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan

tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemegang jabatan struktur organisasi sosial Orang Rimba kelompok Sungai Terap; Temenggung, Depati, Mengku dan Menti
2. Tiga Masyarakat Orang Rimba; Pemuda, tokoh yang dituakan dan salahsatu ketua keluarga komunitas Orang Rimba Kelompok Terap
3. KKI Warsi ; dua orang fasilitator Orang Rimba wilayah timur TNBD dan staf ahli Warsi bagian suku dan budaya.
4. Tiga warga Desa Jelutih diantaranya seseorang yang dianggap tokoh oleh Orang Rimba dan mantan Orang Rimba yang telah masuk Islam.

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap editing
 - a. Hasil wawancara dari alat perekam dipindahkan menjadi traskip lengkap untuk setiap informan.
 - b. Hasil wawancara diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan penerjemah, anggota KKI Warsi.
 - c. Transkip dikempokan dengan variabel yang diteliti.
 - d. Data disusun pervariabel pada setiap informan.

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk transkrip setelah itu data transkrip ditulis dengan bentuk resume, setelah itu dianalisa dengan menggunakan tinjauan teori yang ada.

2. Validitas data

Untuk menjaga validitas data dan menguji penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan triangulasi:

a. Triangulasi Sumber

Mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, pada penelitian ini terdapat beberapa sumber dengan latarbelakang yang berbeda yaitu, pemegang jabatan dalam struktur organisasi, masyarakat dan pemuda pada Orang Rimba guna mendapatkan data valid tentang orientasi politik Orang Rimba. Kemudian juga ungkapan dari anggota Warsi dan Warga desa.

b. Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam penelitian ini setelah melakukan wawancara mendalam dilakukan juga observasi pada informan dan studi dokumen.

c. Trianggulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak maslaah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

3. Tahap interpretasi

Pada tahapan ini data-data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data secara intensif baru dilakukan sesudah berakhirnya pengumpulan data. Menurut Basrowi (2008:91) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246) terdapat tiga komponen analisis, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini ialah dengan cara analisa

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Orientasi politik Orang Rimba terhadap sengketa lahan konsesi HTI dengan PT. Wana Perintis kemudian juga mengklasifikasi tipe budaya politiknya, dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Adapun data yang telah direduksi, meliputi data primer dan sekunder yang sesuai dengan fokus penelitian ini, data yang dianggap tidak perlu seperti ungkapan-ungkapan informan yang melebar atau tidak sesuai dengan fokus kajian dijadikan referensi lain bagi penulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan kemudian disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian

berlangsung. Awal dari pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan posisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Adapun dalam mengverifikasi khususnya dalam bentuk data wawancara, penulis menggunakan penerjemah bahasa Rimba ke bahasa Indonesia melalui anggota KKI Warsi sebagai pendamping penelitian dan juga pepenulis memverifikasi kembali dengan menanyakan keabsahan data tersebut dengan salahsatu tokoh masyarakat Orang Rimba yang bisa berbahasa Indonesia. Penarikan kesimpulan juga melalui beberapa hasil observasi dan dokumen-dokumen yang sesuai untuk dianalisa menggunakan teori dalam tinjauan penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Taman Nasional Bukit Duabelas

Penelitian ini dilakukan di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas disingkat TNBD, kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh pemerintah pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000, tertanggal 23 Agustus 2000. Luas areal keseluruhan kawasan TNBD seluas 60.500 hektar yang terletak di Kabupaten Batanghari $\pm$ 65% (37.000 Ha), Kabupaten Sarolangun $\pm$ 15% (9000 Ha) dan Kabupaten Tebo $\pm$ 20% (11.500 Ha).

Salah satu tujuan penetapan kawasan TNBD secara khusus adalah untuk melindungi dan melestarikan tempat kehidupan dan budaya Orang Rimba yang sejak lama berada di dalam kawasan taman nasional. Untuk pengelolaan kawasan taman nasional ini pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.29/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006 membentuk Balai Taman Nasional Bukit Duabelas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan TNBD dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses perubahan status kawasan hutan dataran rendah Bukit Dua Belas dari Cagar Biosfer ke Taman Nasional pada hakekatnya telah mengurangi ruang hidup komunitas Orang Rimba. Jika pada awalnya dalam penetapan status kawasan hutan menjadi Cagar Biosfer pertimbangan utamanya secara tegas diperuntukan untuk kawasan hidup Orang Rimba sedangkan dalam surat keputusan penunjukkan kawasan TNBD tidak ada bagian yang menyebutkan peruntukkan TNBD untuk kelangsungan hidup Orang Rimba meskipun hal ini menjadi salah satu bagian pertimbangan dalam penetapan perubahan status kawasan menjadi kawasan TNBD.

Secara geografis TNBD terletak diantara arah Utara $01^{\circ} 44'35''$ LS, arah Selatan $2^{\circ} 03'15''$ LS, arah Timur $102^{\circ}31'37''$ BT dan arah Barat $102^{\circ} 48'27''$ BT. Cara pencapaian ke kawasan TNBD dari Kota Jambi melalui Desa Pematang Kabau, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun adalah $\pm$ 200 km, dengan waktu tempuh selama 6 jam; melalui rute: Jambi - Muara Tembesi - Pauh - Desa Pematang Kabau. Pencapaian ke kawasan TNBD dapat dilakukan di masing-masing kabupaten, selain Kabupaten Sarolangun, seperti ke wilayah TNBD di Kabupaten Tebo melalui Lintas Sumatera dari Sumatera Barat, dari arah Sumatera Selatan atau Bengkulu dapat melalui Lintas Sumatera ke wilayah TNBD di Kabupaten Sarolangun.

Visi pengembangan TNBD adalah terwujudnya fungsi kawasan pelestarian alam dan kawasan budaya komunitas Orang Rimba melalui sistem zonasi, yang memberikan sumbangan optimal bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakat adat dan lokal serta pembangunan daerah dan

nasional, yang mengangkat citra pengelolaan konservasi nasional. Menuju pencapaian visi termaksud, misi pengembangan TNBD digariskan sebagai berikut. (a) Menyelenggarakan pembangunan konservasi kawasan; (b) Menjamin kelangsungan eksistensi kawasan sebagai kawasan budaya dan sumber kehidupan ekonomi alternatif bagi komunitas Orang Rimba; (c) Menyelenggarakan kemandirian dan keberdayaan masyarakat adat dan local serta kemitraan usaha dalam pemanfaatan sumber daya kawasan.

Menuju perwujudan visi dan misi yang diemban, dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan taman nasional dan dengan memerhatikan peran spesifik yang diemban serta tekanan dan ancaman yang dihadapi, pokok kebijakan pengelolaan TNBD meliputi: (1) Memantapkan eksistensi kawasan sesuai dengan fungsinya, (2) Mengintegrasikan kebijakan pengembangan kawasan ke dalam kebijakan pembangunan daerah, (3) Memperkuat sistem pengelolaan kawasan, (4) Memulihkan keutuhan habitus kawasan, dan (5) Meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi kawasan.

Secara umum karakteristik daerah penyangga TNBD (dokumen Warsi 2015) terdiri atas beberapa peruntukan sebagai berikut :

1. Daerah Penyangga Bagian Utara, sebagian besar merupakan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Limbah Kayu Utama (PT. LKU), areal perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Desa Makmur (PT. SDM) dan lahan pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Sei. Ruan I, Desa Sei. Ruan II, Desa Peninjauan, Desa Sungai Lingkar, Desa Kembang Seri, Desa Batu Sawar, Desa Padang Kelapo dan Desa Kampung Baru.

2. Daerah Penyangga Bagian Selatan terdiri atas areal transmigrasi Hitam Ulu Desa Pematang Kabau dan Desa Bukit Suba, areal perkebunan kelapa sawit PT. Sari Aditya Loka (PT.SAL), areal perkebunan kelapa sawit PT. Jambi Agro Wiyana (PT.JAW), areal perkebunan sawit PT. Era Mitra Agro Lestari A (PT.EMAL A) dan lahan pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Baru, Desa Semurung, Desa Jernih, dan Desa Lubuk Jering.
3. Daerah Penyangga Bagian Timur merupakan areal HTI PT. Wana Perintis(PT.WP), areal perkebunan sawit PT. Era Mitra Agro Lestari B (PT. EMAL B), lahan pemukiman dan perladangan masyarakat Desa Jelutih, Desa Olak Besar, Desa Paku Aji dan Desa Hajran.
4. Daerah Penyangga Bagian Barat terdiri atas areal transmigrasi Kuamang Kuning (SP.A, SP.E dan SP.G), areal transmigrasi Hitam Ulu (SP.B), areal perkebunan sawit PT. SAL, Areal Penggunaan Lain (APL), dan kawasan hidup komunitas adat Orang Rimba yang berada di luar kawasan TNBD

Pada kawasan Daerah penyangga TNBD terdapat desa asli dan desa yang berasal dari program transmigrasi, terdapat 23 desa yang termasuk dalam 6 kecamatan dan tiga kabupaten. Total jumlah penduduk dikawasan penyangga sebanyak 42.312 jiwa terdiri dari 21.317 Laki-laki dan 20.995 perempuan. Kawasan daerah penyangga TNBD yang saat ini diperuntukkan areal transmigrasi, areal HTI dan areal perkebunan kelapa sawit sebelumnya adalah merupakan kawasan hutan sebagai ruang hidup Orang Rimba. Pada saat dimulainya pembukaan kawasan hutan oleh perusahaan HPH pada pertengahan tahun 1970-an sebenarnya telah mulai terjadi pengurangan dan

tekanan terhadap wilayah kehidupan Orang Rimba, karena banyak pohon dan wilayah hutan yang memiliki fungsi sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat adat Orang Rimba yang hilang.

B. Gambaran Umum Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas

Keberadaan Orang Rimba di kawasan hutan Bukit Dua Belas, jauh lebih dulu sebelum kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan konservasi. Orang Rimba sudah mendiami hutan-hutan di Sumatera Tengah selama beberapa abad hal ini dapat dilihat dari berbagai tulisan Forbes, Van Dongen; Damsté 1901 (dalam Prasetijo 2011:46). Sejak ratusan tahun lalu, paling tidak sejak tahun 1500-an sesuai catatan para penjelajah eropa, Orang Rimba telah melakukan hubungan dagang dan menjalin hubungan kekuasaan dengan kerajaan Jambi. Orang Rimba membayar upeti (*jajah*) kepada kerajaan berupa barang yang bisa didagangkan dan hasil kerajinan agar keberadaan Orang Rimba diakui dan tidak diusik.

Penetapan kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas pada hakikatnya adalah sebagai upaya untuk melindungi kawasan hidup dan kehidupan Orang Rimba yang tengah mengalami berbagai tekanan dari kegiatan perusahaan swasta di bidang kehutanan dan perkebunan serta pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi. Selain itu tujuan khusus penetapan kawasan TNBD lainnya adalah melindungi, memelihara, memperbaiki dan melestarikan kawasan

Hutan Hujan Tropika Dataran Rendah yang memiliki keanekaragaman flora, fauna dan ekosistem yang tinggi dari ancaman kepunahan.

Kawasan TNBD memiliki tidak kurang dari 41 jenis anggrek dari 18 marga yang hidup di TNBD. Berbagai ragam jenis pohon penghasil getah, kayu, daun dan penghasil buah juga banyak di temukan seperti pohon jelutung pohon ini disadap oleh Orang Rimba dan getahnya memiliki nilai ekonomis untuk dijual, pohon tembesu ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diburu oleh para penebang kayu illegal. Nilai ekonomis kayu ini yang dapat menjadi ancaman bagi kawasan TNBD dan komunitas Orang Rimba.

Komunitas Orang Rimba dapat saja melakukan penebangan pohon yang dilindungi dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena adanya relasi dengan para penebang kayu yang berperan sebagai pembeli kayu hasil tebangan atau pemberi modal untuk aktivitas penebangan. Hasil wawancara dengan informan aktivitas penebangan pohon yang dilindungi oleh Orang Rimba untuk kepentingan ekonomi uang atau barang kebutuhan sekunder harus dibatasi dan tidak boleh atau dilarang.

Kawasan hutan TNBD bagi Orang Rimba merupakan benteng terakhir bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan. Setelah sebagian kawasan hutan yang sebelumnya menjadi ruang hidup mereka di jadikan areal perkebunan, areal HTI, mereka akhirnya menyingkir ke arah lebih dalam yaitu kawasan hutan TNBD.

Tabel 1. Sebaran Komunitas Orang Rimba Di Dalam dan Di Luar Kawasan TNBD Menurut Kelompok dan Lokasi

Kelompok	Pimpinan Kelompok	Lokasi	Jumlah Jiwa	Keterangan
Air Hitam	Temenggung Tarib Betaring Nyuyut	S. Paku Aji S. Semapuy S. Semapuy Ulu	38 50 16	Ketiga kelompok ini masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan
	Segrip / Nugraha	TSM Air Panas	76	Sudah memeluk agama Islam dan menjadi warga masyarakat desa Bukit Suban
	Temenggung Majida	S. Keruh	76	Sebagian anggota kelompok sudah memeluk agama Islam dan sudah mengorientasikan diri dengan masyarakat desa
Makekal	Temenggung Mirak Menti Ngandun Tuha Setapak Temenggung Ngukir Wakil Tuha Pelindung Depati Pengelam Depati Laman Senjo	S. Gemuruh S. Pengelaworon S. Aceh Behan S. Bernai Ulu S. Sako Nini Tuo S. Bernai S. Sungkai	134 103 90 100 67 65 41	Masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan
	Temenggung Nggrib Mangku Tuha Besui Laman	S.Kedundung Muda S. Sako Jernang S.Tengkuyungon	83 146 29	Sebagian anggota kelompok sudah mengorientasikan diri dengan masyarakat desa Sudah mengorientasikan diri dengan masyarakat desa
	Temenggung Tuha Bayu	S. Depari	14	Sebagian besar anggota kelompok pindah keTNBD
Kejasung	Temenggung Celetai	S. Kejasung Besar Ulu	65	Masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan
	Temenggung Meladang	S. Kejasung Besar Ulu	72	
	Temenggung Besulit	S. Kejasung Kecil Ulu	49	

	Depati Gerak	S. Keruh Ulu	35	Masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan
Terap / Serengam	Temenggung Menyuraw Temenggung Nggirang	Kedua kelompok ini bergabung di S. Terab	144	Masih mempertahankan jati diri dan tradisi kehidupan alam hutan
	Temenggung Kecil	S. Kejasung Kecil Ulu	31	Tidak ada data
	Temenggung Mulung	S. Kejasung Kecil Ulu	-	
	Temenggung Ngamal Temenggung Nyenong	S. Jernang S. Sakolado	- -	
Total			1.524	

Sumber: KKI-Warsi 2010

Penelitian ini merujuk pada Orang Rimba yang hidup dikawasan Taman Nasional Bukit Duabelas, dimana berdasarkan pengelompokan tempat tinggalnya terbagi ke dalam empat kelompok besar berdasarkan penamaan sungai: Orang Rimba kelompok Kejasung di sisi utara, Air Hitam di sisi selatan, sungai Terap/Serengam di sisi timur dan Makekal di sisi barat. Setiap kelompok tersebut terbagi lagi kedalam sub-sub kelompok berdasarkan anak sungai. Subjek penelitian ini adalah Orang Rimba di wilayah timur TNBD yang termasuk wilayah kelompok Terap. Pemilihan kelompok Terap dilandasi oleh terdapatnya sengketa lahan konsesi HTI Wana Perintis pada wilayah timur TNBD

C. Sejarah Asal Usul Orang Rimba

Studi Orang Rimba pernah dilakukan oleh Johan Weintré pada komunitas orang Rimba di wilayah Taman Nasional Bukit Dua Belas. tujuan penelitiannya untuk mengetahui sejarah asal-usul dan prasejarah kawasan/wilayah hidup Orang Kubu dan Orang Rimba, memahami budaya, tindakan dan filosofi masyarakat Orang Rimba, serta untuk mengetahui mengenai konsep atau pola pikir dan kosmos Orang Rimba dan keinginan mereka pada masa depan.

Hasil penelitiannya Weintre (dalam Prasetijo 2011:46) menunjukkan sejarah asal usul Orang Rimba yang memiliki tiga versi yaitu versi pertama, berdasarkan tulisan antropologi Belanda diantaranya adalah Forbes yang pernah menulis tentang Orang Rimba. Forbes menggambarkan menurut cerita yang dia dengar, orang Rimba berasal dari keturunan dari saudara termuda yang tidak disunat, sebab di sekitarnya tidak ada alat yang cukup tajam untuk melakukan penyunatan. Pemuda merasa malu, sehingga dia mengungsi ke hutan dan berpisah dari kelompoknya serta dua saudara laki-lakinya yang sudah disunat. Menurut mitologi Orang Kubu Sumatra tengah mereka memang keturunan dari saudara yang mengungsi ke hutan.

Versi kedua orang Kubu menceritakan kepada Van Dongen (dalam Prasetijo 2011:47) bahwa mereka keturunan dari pasangan saudara dan saudari kapal bajak, yang dilepaskan oleh nahkoda waktu perempuan itu hamil muda di kapal. Mereka diturunkan di pantai hulu sungai di Sumatera. Pasangan tersebut memiliki banyak anak dan membangun kampung Ulu Kepajang dekat dusun Penamping di sungai Lalan. Menurut pendapat van Dongen

Kubu atau ngubu artinya hutan. Masih ada banyak Orang Kubu yang tinggal sekitar lokasi Ulu Kepajang.

Versi ketiga, mitos mengenai garis keturunan Orang Kubu yang diceritakan kepada Damsté oleh kepala laras Datoeq Padoeko Soetan yang ceritanya berikut ini: Konon peristiwa pada waktu lampau Daulat yang dipertuan dari Pagaruyung duduk di batu di pinggir sungai setelah dia sholat. Dia masukkan sirih ke dalam mulut, kemudian dia mengeluarkannya, selanjutnya batu yang dia duduki bergerak dan dia sadar bahwa sebenarnya dia duduk di atas kura-kura besar yang ada di sungai. Dengan kekuasaan Allah, kura-kura tersebut bunting dan melahirkan anak manusia laki-laki, sebab kura-kura menelan sirih yang dikeluarkan oleh raja. Tiap hari beberapa anak kampung bermain di sungai dan anak manusia laki-laki itu ikut bermain dengan mereka. Setelah bosan bermain, anak manusia kura-kura itu pulang ke ibunya.

Kabar mengenai anak kura-kura didengar raja kemudian raja menyuruh mencari anak tersebut supaya dibawa ke istananya. Raja Pagaruyung bertanya kepada anak siapa bapaknya. Anak langsung menunjuk kepada raja, dia sangat heran dan bertanya kepada anak tersebut bagaimana dia menjadi bapak anak kurakura. Anak tersebut menjawab bahwa menurut ibunya, waktu raja duduk diatasnya dan mengeluarkan sirihnya yang ditelan ibunya, dia langsung hamil dan melahirkan dia. Raja berpikir beberapa saat dan berkata bahwa sebetulnya anak itu benar dan peristiwa itu terjadi. Lalu raja

mengumumkan kepada rakyat bahwa anak tersebut, yang ibunya tenggelam waktu bajir, adalah benar-benar anaknya.

Beberapa tahun kemudian, raja Daulat yang dipertuan dari Pagaruyung, menjelaskan kepada kepala daerah, bahwa anaknya akan menjadi raja negeri dari kota Tujuh, Sembilan Kota, Pitajin Muara Sebo, Sembilan Lurah sampai daerah terpencil Jambi. Mereka semua senang, tetapi pada waktu singkat mereka mendapat kabar bahwa anak tersebut adalah keturunan dari kura-kura. Setelah mereka tahu asal usul raja, mereka tidak setuju dan tidak menerima raja yang berketurunan kura-kura sebagai rajamereka. Lalu mereka menyingkir ke hutan dan hidup disana.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Orientasi politik Orang Rimba terhadap sengketa lahan konsesi HTI PT. Wana Perintis. Pada orientasi kognitif didominasi oleh nilai-nilai adat istiadat, sehingga aspek afektif dan evaluatif Orang Rimba dipengaruhi oleh nilai-nilai adat tersebut. Seperti yang terjadi pada sengketa, mereka menilai bahwa PT. Wana Perintis membuka lahan hutan yang merupakan wilayah mereka dengan adanya tanah-tanah adat.

Orang Rimba menyadari hutan yang di buka oleh PT Wana Perintis akibat adanya otoritas pemerintah selaku pemberi legitimasi. Namun dapat diketahui kesadaran otoritas pemerintah tersebut tidak di ikuti oleh pengetahuannya tentang legalitas yang sah dimata pemerintah. Menyebabkan Orang Rimba pasrah ketika pihak perusahaan membuka wilayah hutan mereka.

Selanjutnya walaupun Orang Rimba memiliki orientasi kognitif yang terbatas, mereka tetap memiliki harapan terhadap sistem politiknya. Adanya harapan tersebut ditandai dari tindakan Orang Rimba yang bekerjasama dengan Warsi. Orang Rimba sebagai pemilik tanah adat dalam konsesi HTI

Wana Perintis menuntut haknya terhadap pemerintah dengan didampingi oleh Warsi.

Kegiatan Orang Rimba untuk meminta haknya dalam konsesi lahan HTI dilandasi dorongan ekonomi. Mereka menilai jika memiliki lahan perkebunan tersebut dapat menjadi sumber penghasilan. Walaupun harapan mereka sesungguhnya hutan tidak dibuka. Namun karena sudah terlanjur mereka tetap menuntut kerugian akibat hilangnya hutan.

Tindakan Orang Rimba dalam orientasi pada objek input politik, seperti yang telah disampaikan. Terdapat peran Warsi sebagai pihak penghubung antara Orang Rimba dengan Pemerintah atas keluhan Orang Rimba. Namun orientasi pada input politik belum bisa dikategorikan sebagai partisipan aktif, karena mereka memiliki ketergantungan terhadap Warsi dalam berhubungan dengan sistem politiknya.

Selanjutnya, dari sengketa lahan tersebut kini Orang Rimba memiliki mata pencaharian baru. Warsi akan memberikan arahan dan mendampingi Orang Rimba untuk mengolah perkebunan karet tersebut. Sehingga Orang Rimba secara perlahan dapat merubah pola hidupnya, yang selama ini hanya memiliki ketergantungan pada sumberdaya hutan saja kini dapat memanfaatkan perkebunan untuk menopang pendapatan ekonominya.

Orientasi politik terhadap sengketa tersebut dapat diketahui bahwa, aspek kognitif Orang Rimba didasari oleh ajaran-ajaran nenek moyangnya. Orang Rimba yang dahulu memiliki keyakinan, bahwa menghindar dan tidak berperilaku seperti orang yang hidup diluar hutan kini mulai berubah. Akibat kesadaran bahwa kini sumberdaya hutan semakin habis, menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena dorongan tersebut, kini Orang Rimba mulai berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain, demi memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga aspek kognitif Orang Rimba masih dalam tahap berkembang, mereka mulai memiliki perhatian orientasi pada negara.

Orang Rimba menganggap pemerintah sebagai pemberi kebijakan, sudah selayaknya dapat membantu kebutuhan hidup mereka. Namun, keyakinannya itu tidak diikuti oleh partisipasinya sebagai warga negara yang baik. Mereka belum dapat menerima kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dengan dalih ingin memepertahankan adat istiadat. Dimana ada keyakinan bahwa hidup Orang Rimba tidak boleh menyerupai perilaku kelompok masyarakat lain.

Aspek afektif Orang Rimba tidak terlepas dari pengaruh aspek kognitifnya. Sehingga Orang Rimba belum mempunyai kemantapan sikap. Pada aspek kognitif yang mulai berkembang, menyebabkan pada sisi afektif lebih cenderung masih dapat dimanipulasi dengan mudah oleh pihak luar. Tidak jarang Orang Rimba sering ditipu atau dibohongi pada saat berinteraksi dengan masyarakat lain. Karena Orang Rimba mudah percaya jika sesuatu

hal dianggap dapat menyenangkan mereka khususnya dalam hal ekonomi dan konsumsi.

Aspek evaluatif Orang Rimba memiliki kecendrungan pada penilaian mereka yang mengaggap bahwa hidup Orang Rimba tidak seperti masyarakat lain yang terdidik. Sehingga ketika Orang Rimba melakukan kesalahan dianggap wajar, namun sebaliknya jika yang melakukan kesalahan tersebut ialah masyarakat luar yang terdidik mereka akan menuntut

Tipe budaya politik Orang Rimba di TNBD khususnya kelompok Sungai Terap yang menjadi subjek dalm penelitian ini, memiliki kecendrungan kearah tipe budaya politik subjek-parokial, dalam tipe tersebut yang lebih dominan yaitu parokial. Memiliki ciri-ciri orientasi politik Orang Rimba yang tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali yang ada disekitarnya. Namun Orang Rimba tetap menaruh kesadaran, minat, dan perhatian terhadap system politik pada umumnya dan terutama terhadap obyek politik output.

Orang Rimba juga tidak banyak berharap terhadap sistem politik yang ada. Mereka lebih cenderung hanya ingin diakui sebagai salahsatu suku bangsa Indonesia yang sedang memperjuangkan hak-hak dan mempertahankan adat istiadatnya. Orang Rimba juga berharap pemerintah dapat membantu kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin sulit akibat menyempitnya hutan. Mereka sadar kini tidak bisa lagi mengandalkan hidup dari hasil hutan saja, akibat banyaknya hutan yang beralih fungsi.

B. SARAN

1. Sikap para pelaksana kebijakan untuk setiap *stake holder* perlu dengan konsisten berusaha untuk lebih baik lagi jika Orang Rimbar diberi pengarahan dan bimbingan dalam hal kognitif. Kemudian negara juga harus hadir dalam lingkungan Orang Rimba. Agar mereka yang sedang ingin menunjukkan jatidiri suku bangsa bisa terbiasa berorientasi lebih nasionalis. Juga bisa sedikit demi sedikit melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus mengubah dan merusak tatanan hukum adat mereka.
2. Sebagai kaum minoritas masyarakat Orang Rimba, tetap harus dihormati keberadaan dan eksistensinya. Meskipun masyarakat Orang Rimba merupakan suatu komunitas yang memiliki prinsip yang berbeda dengan masyarakat lainnya, tetapi di dalam kehidupannya mereka memiliki nilai-nilai positif yang baik serta mengambil sisi positifnya dari kehidupan mereka untuk diterapkan pada masyarakat umum dalam kehidupan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bina Aksara.
- Arbi Sanit, 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV.Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik* (terjemahan Laila Honoum Hisyam). Jakarta: Bina Aksara.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nawawi, Hadari, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia

Prasetijo, Adi. 2011. *Etnografi Orang Rimba Di Jambi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2010. *metode Penelitian Kuanititatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada

Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Prilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Perss

Sitepu,P.Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Widjaja, Albert.1988. *Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT Kerinci Buana

Skripsi:

Kuniawati, Nia. 2011. *Budaya Politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwirdamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Universitas Negeri Semarang

Rokhdian, Dodi. 2012. *Alim Rajo Disembah, Piado Alim Rajo Disanggah: Ragam Bentuk Perlawanan Orang Rimba Makekal Hulu Terhadap Kebijakan Zonasi Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi*. Universita Indonesia.

Dokumen:

Departemen Kehutanan, 2000. Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000.

Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan; Jakarta, Oktober 2009.

SK Menteri Sosial RI No. 5/1994. Tentang Kelompok Masyarakat Terasing.

SK Menteri Kehutanan RI No. 781/Kpts-II/1996. Tentang Izin HTI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1990. Tentang. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

KKI-Warsi. 2003. *Kebijakan Dalam Pemanfaatan Ruang dan Sumberdaya*

SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000.

PP Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan lahan terlantar

Website:

[www.alamsumatera.org //bulletin2015-07-01](http://www.alamsumatera.org/bulletin2015-07-01)